



SKRIPSI

Judul:

Kepastian Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pemenuhan
Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban
Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 564/PID.SUS./2024

Disusun oleh:

SAYYIDINA AZZAHRA
NIM. 205220265

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2026

KEPASTIAN PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMENUHAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANGERANG NOMOR 564/PID.SUS./2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Sayyidina Azzahra
NIM : 205220265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025

Pengesahan

Nama : SAYYIDINA AZZAHRA
NIM : 205220265
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kepastian Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pemenuhan
Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban
Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 564/PID.SUS./2024
Title : Certainty Of Aggravated Sentencing For Protecting Women
With Disabilities Who Are Sexual Violence Victims In
Tangerang District Court Decision 564/Pid.Sus./2024

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 08-Januari-2026.

Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.

NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 08-Januari-2026

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : SAYYIDINA AZZAHRA
NIM : 205220265
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pemenuhan
Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban
Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 564/PID.SUS./2024

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12 Desember 2025

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a solid horizontal line.

Abstrak

UU TPKS memberikan perlindungan khusus untuk kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan seksual melalui ketentuan pemberatan pidana sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf h, yang mengatur penambahan sepertiga dari ancaman pidana apabila tindak pidana dilakukan pada penyandang disabilitas. Dalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus./2024/PNTng, seorang dengan disabilitas menjadi korban pelecehan seksual fisik, Dimana pelaku melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban yang seorang tuna wicara dan tuna rungu. Atas perbuatannya pelaku diancam atas tindak pidana pelecehan seksual fisik sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Adanya putusan pidana penjara tersebut dirasa tidak memberikan keadilan bagi korban karena tidak memperhatikan bahwa korban merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk metode menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berhubungan dengan pemberatan sanksi terhadap korban pelecehan seksual fisik. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU TPKS telah memberikan dasar pemberatan pidana yang lengkap, implementasinya dalam perkara tersebut belum optimal.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pemberatan Pidana, UU TPKS, Perlindungan Korban.

Abstract

The TPKS Law provides special protection for vulnerable groups who are victims of sexual violence through criminal provisions in line with Article 15 paragraph (1) letter h, which regulates the addition of one-third of the criminal threat if a criminal act is committed against a person with a disability. In Decision Number 564/Pid.Sus./2024/PNTng, a person with a disability becomes a victim of physical sexual harassment, where the perpetrator physically sexually harasses the victim who is a speech and deaf person. For his actions, the perpetrator was threatened with the crime of physical sexual harassment in accordance with Article 6 letter c of the TPKS Law and sentenced to 3 (three) years in prison. The existence of the prison sentence is felt to not provide justice for the victim because it does not pay attention to the fact that the victim is a person with a disability who has a vulnerability. In this study, a normative legal research method was used which aims to find legal rules, legal principles, and legal doctrines related to the imposition of sanctions on victims of physical sexual harassment. The results of the study show that although normatively the TPKS Law has provided a complete basis for criminal incrimination, its implementation in the case is not optimal.

Key Words: *Persons with Disabilities, Criminal Aggravation, TPKS Law, Victim Protection.*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat seluruh Rahmat dan Hidayat-Nya, penulis berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepastian Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pemenuhan Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 564/Pid.Sus./2024” dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. yakni Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., L.L.M., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Dr. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum yakni Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi
6. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi;
7. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Umar dan Ibu Hidayani, yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, nasihat, serta memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi penulis, juga kepada seluruh keluarga yang memberikan dukungan;
10. Sahabat penulis, Reina, yang dengan kesabaran dan empatinya kerap memberikan dukungan emosional serta menjadi tempat konsultasi pribadi selama penyusunan skripsi ini;
11. Nadya, Septi, Jasmine, Abil, Vivin, Mario, Hilal, selaku teman-teman seperjuangan penulis dari semester 1 hingga semester akhir perkuliahan ini;
12. Teman-teman seperbimbingan, terkhusus Rido yang selama proses penyusunan skripsi selalu memberikan dukungan, serta menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan ini dan seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah Bersama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua doa dan dukungan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya perihal perlindungan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

Jakarta, 11 Desember 2025

Penulis

Sayyidina Azzahra

Pernyataan

Nama : SAYYIDINA AZZAHRA
NIM : 205220265
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pemenuhan
Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban
Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 564/PID.SUS./2024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2025

Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp featuring a Garuda emblem and a signature. The stamp includes the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", "METERAI", and "18BBAAAN 188183527".

SAYYIDINA AZZAHRA
NIM. 205220265

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ORISINALITAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DASFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian	16
5. Teknik Analisis Data	17

F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	19
A. Teori Pidana dan Pemidanaan	19
B. Teori Perlindungan Hukum	27
C. Teori Keadilan	32
D. Teori Kepastian Hukum	34
BAB III DATA PENELITIAN	38
A. Pengaturan Pemberatan Pemidanaan dalam beberapa hukum positif di Indonesia.....	38
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	39
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	40
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	41
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	44
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	45
B. Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024 PNTng.....	48
1. Kasus Posisi	48
2. Tuntutan	49
3. Pertimbangan Hakim.....	50
4. Amar Putusan	53
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55
A. Pengaturan Pemberatan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Indonesia.....	55

B. Analisis Putusan Nomor 564/Pid.Sus./2024/Pntng Dalam Kepastian Pemberatan Pidanaan Terhadap Pemenuhan Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.....	71
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	103

Daftar Singkatan

UUD NKRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP Nasional	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU TPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
CRPD	: <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
CATAHU	: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan
KOMNAS PEREMPUAN	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
SIMFONI-PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
JPU	: Jaksa Penuntut Umum

Daftar Tabel

Tabel 4.1 : Perbandingan Pasal Kekerasan Seksual

Daftar Lampiran

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	Letter of Acceptance Journals Sinta (3)
Lampiran 9	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	:	Poster
Lampiran 11	:	Sertifikat HKI Poster
Lampiran 12	:	Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 564/Pid.Sus./2024/PNTng